



BPK Periksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Parpol Pemkab Gunungkidul

GUNUNGKIDUL, TRIBUN

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY melakukan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2024.

Kepala BPK Perwakilan DIY, Agustin Sugihartatik mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan sebagai *entry meeting mandatori* dari undang-undang.

"Kami melaksanakan pemeriksaan untuk pemeriksaan interim dan pemerik-

saan dana bantuan Partai Politik secara bersamaan. Pemeriksaan interim akan kami laksanakan selama 25 hari setelah data kami terima," ucapnya dalam keterangannya pada Minggu (9/2).

Dia menambahkan, pihaknya juga bakal melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan parpol selama delapan hari setelah data diterima. "Semua data yang kami butuhkan untuk pemeriksaan sudah kami terima," katanya.

"Kami berharap pemeriksaan dapat berjalan dua arah, antara Pemkab Gu-

nungkidul dengan tim pemeriksa. Sehingga pemeriksaan menjadi *fair*, artinya ketika kami menyampaikan suatu kelemahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dapat memberikan data atau informasi yang baik dan benar," ujarnya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta merespons dengan baik pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan adalah sebuah bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah.

"Tentu, Pemda dalam hal ini sebagai pengguna

anggaran sangat memberikan apresiasi yang setinggi tingginya dan memberikan akses dokumen yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan," kata dia.

Sunaryanta berpesan kepada seluruh jajarannya untuk dapat memberikan akses data yang diminta seluas luasnya agar sebuah transparansi dapat terwujud di Gunungkidul.

"Salah satu pemeriksaan ini adalah bagian dari acuan ke depan bagaimana untuk mendapatkan reputasi WTP, dan yang lebih penting penggunaan anggaran secara transparan," urainya. (ndg)